

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Media Massa sebagai saluran informasi bagi khalayak atau pembaca untuk menggali pengetahuan yang dikirim melalui berita. Pesan atau informasi yang disebarkan melalui media massa bersifat umum (public), sehingga tidak ditujukan kepada perorangan atau sekelompok orang tertentu. Informasi tersebut juga berisi pengetahuan yang didapat dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Media massa juga memiliki kekuatan dan kepentingan yang sangat signifikan dalam usaha mempengaruhi khalayaknya, seperti dikemukakan oleh Althusser dan Gramsci dalam Sobur (2004 : 30).

Masyarakat mengharapkan bahwa media massa dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya dan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermuatan politik, moral, dan sosial. Dari situ terlihat bahwa media berpotensi menjadi sarana unggul untuk memperoleh penggambaran atau citra pribadi, namun juga bagi kalangan publik atau kelompok sosial. Media mampu menyuguhkan nilai-nilai normatif yang disatukan dengan berita dan hiburan (Mc Quail, 1994 : 3).

Menganut pada paradigma Konstruksionis yang diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif yaitu Peter L. Berger bahwa sebuah realitas tidak dibentuk secara alamiah, tidak juga sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, melainkan dibentuk dan dikonstruksi. Dengan pemahaman semacam ini, realitas berwajah ganda atau plural.

Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang memiliki pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing (Eriyanto 2005 : 15-16).

Jika dihubungkan pada berita, paradigma konstruksionis memandang bahwa “Fakta/peristiwa adalah hasil konstruksi”. Bagi kaum Konstruksionis, realitas itu bersifat subjektif. Realitas itu hadir, karena dihadirkan oleh konsep subjektif wartawan. Dalam paradigma Konstruksionis, tidak ada realitas yang bersifat objektif, karena realitas itu tercipta lewat konstruksi dan pandangan tertentu. Realitas bisa berbeda-beda, tergantung pada bagaimana konsepsi ketika realitas itu dipahami oleh wartawan dan punya pandangan berbeda (Eriyanto 2005 : 19).

Sebenarnya berita adalah hasil dari proses kompleks dari menyortir atau memilah-milah berita dan menentukan peristiwa dalam kategori tertentu. Dalam menyajikan berita yang akan disampaikan pada masyarakat, tentunya ada kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh keredaksian yang dapat membatasi kebebasan wartawan dalam menuliskan dan menyampaikan berita. Kebijaksanaan redaksional tersebut menjadi pedoman dan ukuran dalam menentukan kejadian macam apa yang patut dipilih dan diangkat menjadi berita yang layak tayang.

Jadi pada dasarnya semua kinerja wartawan dalam menulis berita selalu dipilih dalam kantor redaksi. Secara tidak langsung, khalayak akan terlebih dahulu membaca judul berita utama sebelum membaca berita secara keseluruhan. Jika bagian judul sudah tidak dianggap menarik, maka khalayak tidak akan tertarik untuk mengetahui isi berita didalamnya. Untuk itu, tulisan yang mempunyai nilai berita

tinggi serta nilai layak jual akan ditempatkan oleh redaksi sebagai *headline* atau berita utama. Tidak hanya itu saja, untuk membuat informasi lebih bermakna biasanya sebuah media melakukan penonjolan-penonjolan terhadap suatu berita. Dalam mengambil keputusan mengenai isi mana yang akan ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita (Sobur, 2001 : 163).

Jurnalistik online (*Online Journalism*) adalah pelaporan fakta yang diproduksi dan disebarluaskan melalui internet. Jurnalistik online atau media online menjadi media alternatif setelah koran, radio, dan majalah atau tabloid. Perlu diketahui bahwa salah satu keunggulan media online ialah penyajian format berita yang lebih beragam. Berita dengan format foto, video, dan artikel bisa dimuat melalui media ini. Pada dasarnya jurnalistik konvensional dan jurnalistik online tidak berbeda jauh, yang membedakan hanyalah penyebarluasan berita saja. Namun dari segi sifat, keduanya sama-sama dituntut untuk menyajikan berita paling *up to date* secepat mungkin dan seaktual mungkin.

Dalam menyajikan berita yang akan disampaikan kepada khalayak, tentunya ada kebijakan-kebijakan redaksional untuk menentukan dan membatasi wartawan dalam menulis berita. Artinya, kebijakan redaksional menjadi sebuah pedoman serta ukuran dalam menentukan kejadian macam apa yang akan diangkat dan dipilih untuk menjadi berita maupun bahan komentar. Visi pokok yang dijabarkan menjadi kebijakan redaksional tersebut menjadi kerangka acuan serta kriteria dalam menyeleksi dan mengolah bahan menjadi berita. (Oetama, 2001 : 146)

Konstruksi berita yang dibuat di tiap media massa pun berbeda-beda termasuk media online. Fakta yang akurat dan aktualisasi masyarakat, merupakan perwujudan dari sebuah informasi atau berita yang selaras, seimbang, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu setiap perspektif media dalam mengolah dan menyusun berita akan selalu berbeda-beda serta visi dan misi yang dibangun dan diciptakan oleh masing-masing media. Dalam mengkonstruksi suatu realitas, setiap berita online memiliki kebijakan untuk membuat berita terlihat objektif atau tidak dimata pembaca.

Penulis mengambil pemberitaan media online Detik.com dengan Tempo.co. Pemberitaan kedua media tersebut memiliki cara pandang atau arah pemberitaan yang spesifik, serta berbeda satu sama lainnya dalam menyeleksi suatu isu dan menulis berita. Berita yang diambil mengenai pidato kontroversial Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dimuat dalam berita Detik.com dan Tempo.co.

Contoh berita berdasarkan sumber yang dikutip dari Detik.com pada Minggu 16 Oktober 2017, dengan Judul “Anies: Dulu Pribumi Ditindas, Saatnya Kita Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri”. Dari Judul berita tersebut, Detik.com ingin memberikan sudut pandang pemberitaannya kepada khalayak mengenai isu yang dipersoalkan dalam pidato Anies Baswedan.

Gubernur baru DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengisi pidato perdananya di Gedung Balai Kota Jakarta pada Minggu 16 Oktober 2017. "Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ujar Anies di Selamatan Jakarta yang digelar di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017). Pada kesempatan itu, Anies membicarakan soal perjuangan bangsa Indonesia. Dia bahkan

mengingatikan sejarah negara yang terjadi di Jakarta, termasuk soal Sumpah Pemuda. Namun dia menyoroti mengenai kolonialisme yang masih dekat dengan warga DKI. Anies menulis khusus orasi yang digelorkannya itu. "Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat, penjajahan di depan mata, selama ratusan tahun. Di tempat lain mungkin penjajahan terasa jauh tapi di Jakarta bagi orang Jakarta yang namanya kolonialisme itu di depan mata. Dirasakan sehari-hari," kata dia, "Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. 'etèk sè atellor ajâm sè ngèremmè', itik yang bertelur ayam yang mengerami," sambung Anies. (<https://news.detik.com/berita/d-3686805/gubernur-anies-dulu-di-jakarta-kolonialisme-ada-di-depan-mata>)

Sontak penggalan kutipan dari istilah “pribumi” tersebut menjadi bagian dari penonjolan berita di media massa, terutama yang lebih banyak bahasannya di beberapa situs portal berita online. Penggalan kutipan diatas merupakan contoh dari situs berita online Detik.com. Dari berita tersebut, muncul berita-berita yang mengikuti isu dari pidato Anies Baswedan. Seperti contoh berita dari Tempo.com yang isinya lebih mengkritik pidato Anies Baswedan yang membahas isu tersebut sebagai berikut:

“Kontroversi Kata Pribumi di Pidato Gubernur Anies Baswedan”

TEMPO.CO, Jakarta - Jagad perbincangan dunia maya ramai oleh kontroversi ucapan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pemicunya adalah penggunaan kata "Pribumi" dalam pidatonya sebagai Gubernur, tak lama setelah pelantikannya di Istana oleh Presiden Joko Widodo, Senin 16 Oktober

2017. Ucapan itu disebut-sebut banyak kalangan bernada rasial. Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dituding membangkitkan luka lama yang muncul saat kontestasi Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu.

Pidato sambutan dibacakan Anies Baswedan di halaman gedung Balai Kota saat menyapa para pendukungnya. Rangkaian kalimat yang ia utarakan pada bagian awal pidato itu mengandung pesan mulia yang mengajak warga Jakarta bersatu padu memajukan kota Jakarta.

Reaksi atas pidatonya baru bermunculan tak lama ketika ia menggunakan kata “Pribumi” untuk mengingatkan kembali sejarah perjuangan melawan penjajahan. Kata itu hanya muncul satu kali. Namun narasi yang merangkai setelahnya melahirkan beragam tafsir dan reaksi masyarakat.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memenangkan Pilkada Jakarta 2017 mengalahkan pasangan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dalam persaingan yang berat dan sarat politisasi identitas. Isu agama dan ras mendominasi kampanye Anies Baswedan, dan menyerang pasangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Elektabilitas Ahok yang tinggi juga telak tergerus setelah kasus penistaan agama yang membuatnya masuk penjara, setelah kekalahannya di Jakarta. Pengadilan kasus penistaan atas laporan pendukung Anies Baswedan sepanjang Pilkada adalah salah satu pemicu kekalahannya.

Ketua Setara Institut, Hendardi, menilai pidato Anies Baswedan sarat politisasi identitas. Nuansa rasisme yang muncul atas pidato itu

dikhawatirkan membahayakan jalannya pemerintahan ibukota nantinya. “Pidato Anies Baswedan yang penuh paradox: satu sisi mengutip pernyataan Bung karno tentang negara untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan sepremasi etnisitas,” ujarnya melalui surat pernyataan sikap. Menurut Hendardi, pernyataan Anies Baswedan tersebut juga bisa dikulifikasi melanggar semangat etis Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Koordinator Aliansi Nasional Bhineka tunggal Ika, Agnes Dwi Rusjiati, menilai penggunaan kata pribumi rentan melahirkan gesekan horizontal. Sebagai seorang pemimpin, Anies Baswedan mestinya memahami sejarah kelam yang terjadi pada 1998 lalu. Masyarakat di Indonesia hingga kini belum sepenuhnya pulih dengan konflik berlatar ras itu. “Sebagai seorang pemimpin, Anies mestinya paham sejarah. Bukan malah membangkitkan isu-isu rasial lagi,” kata dia. “Indonesia pernah mempunyai sejarah kebencian atas etnis tertentu,”

Agnes juga mengingatkan lagi konflik berlatar sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang mencuat menjelang pemilihan Gubernur Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut dia, gelombang penolakan massa terhadap calon inkumben, Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu terjerat kasus dugaan penistaan agama, tak hanya berdampak di Jakarta. Reaksi protes juga tumbuh subur di berbagai tempat. Ia khawatir konflik di Jakarta saat ini kembali merembet ke wilayah-wilayah lain. “Jakarta adalah barometer Indonesia,” ujarnya.

Pembelaan atas ucapan Anies datang dari Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid. Menurut dia, penggunaan kata pribumi tak bertendensi meletupkan konflik bernuansa sara. Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, juga pernah menggunakan kata itu dalam pidatonya. “Apakah Pak Jokowi dan Bu Mega artinya ingin memecah belah bangsa? Kalau tidak, kenapa Pak Anies dianggap memecah belah?” ujar Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam penggunaan sebutan pribumi” dalam pidato Anies Baswedan, Senin, 16 Oktober 2017. Ketua LBH Jakarta Alghiffary menyebut pemilihan penggunaan kata "pribumi" dalam pidato resmi pejabat negara kontraproduktif dengan upaya mendorong semangat toleransi dan keberagaman.

Alghiffary mengatakan, penggunaan kata pribumi di lingkungan pemerintahan telah dicabut sejak diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Sebutan Pribumi dan Nonpribumi oleh Presiden Habibie untuk mengakhiri polemik rasialisme terhadap kelompok Tionghoa di Indonesia pada masa itu.

Pun juga sebutan pribumi dalam pidato publik juga melanggar semangat penghapusan diskriminasi rasial dan etnis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selain juga pidato Anies dinilai bertentangan dengan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menyebutkan umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis.

Anies yang dimintai tanggapan ihwal kontroversi kata Pribumi menuding sejumlah media salah mengemas ucapan pidatonya. Menurut dia, istilah yang ia gunakan merujuk pada pengalaman era kolonial. Di era tersebut, kata dia, warga Jakarta memiliki pengalaman panjang menghadapi penjajahan. “Yang lihat Belanda dari dekat siapa? Jakarta. Coba kita di pelosok-pelosok itu, tahu ada Belanda, tetapi lihat di depan mata? Engga. Yang lihat di depan mata itu yang ada di Kota Jakarta,” kata dia.

Anies enggan menanggapi penilaian yang menganggap ucapannya soal pribumi melanggar UU tentang Penghapusan Diskriminasi SARA. Mantan Menteri Pendidikan jilid pertama pemerintahan Jokowi itu langsung meninggalkan wartawan. “Sudah ya,” . Usai berkenalan dengan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, ia melanjutkan aktivitasnya menghadiri rapat paripurna istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta. Hari pertama Anies Baswedan bekerja juga diisi dengan agenda blusukan ke permukiman warga Mampang, Jakarta Selatan. (<https://fokus.tempo.co/read/1025633/kontroversi-kata-pribumi-di-pidato-gubernur-anies-baswedan>)

Berita tersebut penulis unggah dari laman atau portal berita Tempo.co, pada tanggal 17 Oktober 2017, sehari setelah pelantikan Gubernur Baru Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno. Istilah pribumi dalam pidato perdana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun memunculkan kritik dari para netizen media online serta sebagian kalangan politisi karena istilah tersebut mengarah pada sentimen rasial. Narasi dari tiap pemberitaan antara Detik.com dengan Tempo.co pun berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang bingkai dan konstruksinya terhadap realitas. Perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan hendak dibawa kemana berita tersebut. Sejak dahulu, peneliti-peneliti komunikasi menyadari betapa kuatnya peran media komunikasi dalam bentuk pemikiran masyarakat. Media komunikasi memiliki keperkasaan dalam mempengaruhi masyarakat terutama pengaruh yang ditimbulkan oleh media massa (Effendy, 2003).

Menurut Eriyanto, dalam bukunya Analisis Framing tahun 2002, mengatakan bahwa pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi media adalah dengan menggunakan analisis framing. Latar belakang dan ideologi yang dimiliki oleh suatu media akan berpengaruh terhadap konstruksi realitas yang akan dibentuk, sehingga kejadian yang sama dapat dimaknai berbeda oleh masing-masing media. Hal ini dikarenakan objektivitas tergantung pada bagaimana sebuah media memaknai realitas yang berkembang.

Maka dari pembahasan framing pada kedua media online tersebut, peneliti ingin mengkonstruksi tentang perbedaan berita dari situs media online yaitu

Detik.com dan Tempo.co tentang kontroversi pidato Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan, yang dianggap menuai isu rasial atau SARA pada tanggal 16-20 Oktober 2017. Kedua situs tersebut memiliki cara pandang berbeda dalam menyeleksi sebuah isu dan pemberitaannya tentang kasus pidato Anies Baswedan.

Lagipula isu yang dibangun merupakan keberlanjutan efek SARA tumbuh subur semenjak menjelang Pilgub DKI Jakarta beberapa bulan yang lalu serta kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Efek SARA yang muncul di masyarakat Jakarta merupakan bagian dari kampanye tandingan antara pihak pendukung calon Gubernur dan wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dengan pihak pendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Dari situs berita Detik.com memberikan penjelasan dari sudut pandang yang positif tentang pemberitaan pidato Baswedan tersebut. Pasalnya, pidato tersebut tidak mengandung unsur sara yang diangkat. Seperti penggalan berita Detik.com sebagaimana Hidayat Nur Wahid memberikan penjelasan istilah pribumi Anies Baswedan kepada khalayak pembaca, "Semangat yang dibangun tentu bukan semangat dikotomi yang disebut sebagai pribumi atau bukan pribumi. Karena semangat besar beliau ingin jadi pemimpin semuanya, dalam semangat rekonsiliasi," kata Hidayat di kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Situs berita online Detik.com lebih banyak dibaca oleh khalayak dengan pelaporan berita yang disajikan secara cepat, namun belum tentu berita yang disajikan tersebut benar-benar akurat. Sedangkan pada situs berita Tempo.co mengenai pemberitaan diatas disajikan dengan sudut pandang yang negatif dan pemberitaannya lebih mengkritik Anies Baswedan mengenai penggalan kata

“pribumi” dalam pidato perdananya. Kritik tersebut diperkuat Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial sebagaimana telah diratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 menyebutkan umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apa pun, baik ras maupun etnis.

Untuk melihat perbedaan kedua media antara Detik.com dan Tempo.co dalam mengungkap realitas peneliti memilih analisis framing sebagai metode penelitian. Analisis ini mencermati strategi seleksi, sumber, dan pihak keterkaitan mengenai suatu kasus, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, menarik, berarti atau mudah diingat untuk menggiring inerorientasi khalayak sesuai dengan perspektifnya. Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

Penulis menggunakan metode kualitatif dengan model analisis framing Robert N. Entman yang menggunakan 2 pendekatan yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari isu. Seleksi isu adalah aspek yang berhubungan dengan pemilihan fakta dari realitas yang kompleks dan beragam, serta aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Penonjolan aspek tertentu dari isu adalah aspek yang berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, selanjutnya bagaimana aspek tersebut ditulis. Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak (Eriyanto, 2002).

Entman membagi perangkat framing menjadi 4 bagian yaitu, Define Problem (pendefinisian masalah) yakni menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan, Diagnoses Causes (memperkirakan masalah) merupakan elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa, Make Moral Judgement (membuat pilihan moral) merupakan elemen framing yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat, Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian) penyelesaian itu tentu saja sangat bergantung pada peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto, 2002 : 225-227).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana frame berita tentang pidato kontroversial Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan pada situs berita online Detik.com dan Tempo.co?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana frame berita tentang pidato kontroversial Gubernur baru DKI Jakarta Anies Baswedan pada situs berita online Detik.com dan Tempo.co.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis tujuan penelitian ini ialah untuk menambah kajian dalam bidang ilmu komunikasi dengan analisis framing untuk melihat konstruksi isi berita yang dikemas oleh media.

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan informasi cara pandang khalayak masyarakat dalam melihat media yang mengkonstruksi realitas sebagai sebuah berita sehingga dapat menjadi lebih kreatif dan kritis dalam membingkai berita.